

PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN STABILITAS EMOSIONAL ANAK MELALUI KEPUTUSAN HAK ASUH**Mohamad Eka Purwanto Ngurawan¹ , Nur Mohammad Kasim² , Dolot Alhasni Bakung³**^{1,2,3}Universitas Negeri GorontaloE-mail: bayungurawan77@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :15-12-2024

Revised :05-01-2025

Accepted :11-01-2025

Keywords: *child custody, psychological well-being, principle of the child's best interests***DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This research aims to analyze the principles applied by judges in considering children's psychological aspects when deciding post-divorce custody cases, as well as evaluating the impact of these decisions on the child's welfare. The main focus of this research is on how court decisions affect children's emotional conditions, education, behavior and physical health. This research uses a normative legal method with a statutory and comparative approach, supported by qualitative analysis of secondary data such as statutory regulations, legal literature and relevant precedents. The research results show that decisions regarding child custody have a significant impact on children's psychological development. Children in custody change situations often experience anxiety, stress, and emotional instability, especially if the decision does not take the child's overall best interests into consideration. In contrast, decisions based on comprehensive analysis, including considering the stability of the environment, the child's relationship with parents, and the child's opinions according to their age and maturity, can support healthy mental and emotional development. This research also emphasizes the importance of involving child psychology experts in the judge's decision-making process to ensure that negative impacts can be minimized. This research recommends increasing judges' understanding of the psychological aspects of children, providing training for parents, and enforcing principles oriented towards child welfare. With the right approach, it is hoped that the judge's decision can provide a solution that is not only fair but also prioritizes the best interests of the child, thus supporting their growth and development in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip yang diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan aspek psikologis anak saat memutuskan perkara hak asuh pasca perceraian, serta mengevaluasi dampak dari putusan tersebut terhadap kesejahteraan anak. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana keputusan pengadilan memengaruhi kondisi emosional, pendidikan, perilaku, dan kesehatan fisik anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan, didukung oleh analisis kualitatif terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta preseden yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan terkait hak asuh anak membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang berada dalam situasi perubahan hak asuh sering kali mengalami kecemasan, stres, dan ketidakstabilan emosional, terutama jika keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh. Sebaliknya, keputusan yang didasarkan pada analisis yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan stabilitas lingkungan, hubungan anak dengan orang tua, dan pendapat anak sesuai dengan usia dan kematangan mereka, dapat mendukung perkembangan mental dan emosional yang sehat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli psikologi anak dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman hakim tentang aspek psikologis anak, penyediaan pelatihan bagi orang tua, serta penegakan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan pendekatan yang tepat, putusan hakim diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya adil tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik anak, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan.

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang mengikat secara spiritual dan moral.¹ Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai religius

¹ Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2016). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>

dalam kehidupan berkeluarga di Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah. Definisi ini menekankan dimensi keagamaan dari perkawinan, terutama bagi umat Islam. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi khusus mengenai perkawinan, melainkan hanya menyebutkan dalam Pasal 26 bahwa perkawinan dipertimbangkan melalui aspek hukum perdata semata. Ini berarti bahwa dalam sistem hukum perdata, sahnya perkawinan bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum yang diatur, tanpa mempertimbangkan dimensi religius.

Anak merupakan bagian integral dalam sebuah keluarga. Dalam pengertian hukum positif Indonesia, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa. Anak memerlukan perawatan, cinta, dan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhannya. Hak-hak dasar anak, seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan, dan hak-hak sipil, diakui dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² Selain itu, anak juga dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam masa depan suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

Perceraian merupakan salah satu alasan yang dapat mengakhiri sebuah perkawinan. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah mengenai hak asuh anak. Ketika perkawinan resmi dibubarkan oleh pengadilan dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, hak asuh anak menjadi isu yang sangat penting.³ Dalam hukum, hak asuh adalah kewenangan yang diberikan kepada salah satu orang tua atau pihak lain untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak. Keputusan ini biasanya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk usia anak, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, serta kemampuan finansial dan emosional orang tua dalam merawat anak.

Secara normatif, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka meskipun telah bercerai. Dalam banyak kasus, salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh. Ibu sering kali merasa berhak karena ia yang mengandung dan melahirkan anak, sementara ayah mungkin mengklaim hak asuh berdasarkan kontribusi finansial. Ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Namun, keputusan ini sering kali menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi anak maupun orang tua.

² Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2017). PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 11(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>

³ Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>

Penetapan hak asuh oleh pengadilan di Indonesia mengacu pada peraturan yang berlaku, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk non-muslim. Dalam KHI, Pasal 105 mengatur bahwa hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan yang kuat untuk memutuskan sebaliknya.⁴ Sementara itu, dalam KUHP, pertimbangan serupa juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Meskipun secara hukum keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi anak, dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan sering kali sulit dihindari. Anak-anak yang terlibat dalam konflik hak asuh rentan mengalami trauma, stres, dan gangguan psikologis lainnya, seperti kecemasan dan depresi. Konflik yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi hubungan anak dengan kedua orang tua mereka.

Dampak psikologis yang dialami anak akibat perceraian orang tua sering kali bersifat jangka panjang. Dalam situasi perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling terkena dampaknya. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan merawat mereka, perubahan dalam rutinitas sehari-hari, dan konflik antara orang tua dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk terus memberikan dukungan emosional kepada anak meskipun mereka telah bercerai. Orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional, tetap terpenuhi.

Hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional. Dalam banyak kasus, pengadilan perlu mempertimbangkan kondisi emosional anak sebelum membuat keputusan mengenai hak asuh. Hal ini mencakup analisis hubungan anak dengan masing-masing orang tua, stabilitas lingkungan tempat tinggal, dan kemampuan orang tua untuk memberikan perhatian yang konsisten.⁵ Keputusan yang dibuat oleh pengadilan harus dapat memberikan rasa aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan ahli psikologi anak dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kasus tertentu, hak asuh juga dapat diberikan kepada pihak ketiga jika pengadilan menilai bahwa kedua orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Pihak ketiga ini biasanya adalah anggota keluarga dekat, seperti kakek, nenek, atau saudara kandung. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa ia berada dalam lingkungan yang mendukung. Selain itu, pengadilan juga dapat menetapkan hak kunjungan bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, sehingga hubungan antara anak dan kedua orang tua tetap terjaga.

⁴ Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah sebagai problem solver terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>

⁵ Widanengsih, N. A., & Maryandi, N. Y. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53-59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak. Namun, implementasi dari peraturan tersebut sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin tidak mematuhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh atau hak kunjungan, sehingga menimbulkan konflik yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak.⁶

Selain aspek hukum, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya dalam penetapan hak asuh anak. Di Indonesia, norma budaya sering kali memengaruhi persepsi masyarakat tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh. Misalnya, dalam beberapa budaya lokal, ibu dianggap sebagai pihak yang paling cocok untuk merawat anak, sementara ayah lebih diharapkan untuk memberikan dukungan finansial. Norma-norma ini sering kali menjadi faktor tambahan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Kesimpulannya, hak asuh anak merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dalam penyelesaian kasus perceraian. Keputusan pengadilan mengenai hak asuh harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologi, dan budaya. Orang tua yang bercerai memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui sistem hukum yang lebih komprehensif dan inklusif harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip atau aturan yang ada dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif ini mengambil pendekatan studi kasus dalam konteks hukum yang bersifat normatif dengan fokus pada tindakan hukum yang dihasilkan.⁷ Dalam penelitian ini, hukum dianggap sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Metode penelitian hukum empiris juga diterapkan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis serta mengkaji bagaimana hukum beroperasi di masyarakat dan bagaimana penerapannya dalam situasi nyata.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang

⁶ Mumtaz, H., Jr, Uyun, Y. S., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(7), 715–726. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>

⁷ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.

diselidiki. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan memberikan gambaran dan menjelaskan secara rinci hasil dari metode yang diterapkan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan dan validasi terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara terperinci menjelaskan analisis terkait dampak psikologis anak yang disebabkan oleh putusan hakim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder mencakup buku, catatan, bukti yang sudah ada, dan arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak. Peneliti mengumpulkan informasi dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, dan pusat arsip, serta melakukan pembacaan intensif terhadap buku-buku relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan hukum dan preseden hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel, makalah, dan data lainnya yang mendukung pemahaman tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan sebagai panduan, termasuk kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Sebagai penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Data diambil dari buku-buku yang membahas putusan hakim, pernikahan, dan aspek psikologi anak. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengatur data, menyusun menjadi unit-unit yang dapat diolah, menyatukan informasi, mengidentifikasi pola, serta menentukan narasi yang dapat disampaikan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Hakim Dalam Mempertimbangkan Aspek Psikologis Saat Membuat Keputusan Tentang Hak Asuh Anak

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan harus mewakili hati nurani masyarakat yang mencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan.⁸ Keputusan tersebut tidak boleh membingungkan masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat atau profesional hukum lainnya. Dalam konteks hukum keluarga, hak asuh anak merupakan salah satu isu yang paling kompleks, dan keputusan terkait hal ini sering kali melibatkan pertimbangan yang mendalam dari sisi hukum, psikologi, serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Menurut Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1, dalam kasus perselisihan kepemilikan anak-anak, pengadilan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Putusan pengadilan dalam sengketa hak asuh anak tidak hanya bertujuan untuk menetapkan

⁸ Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 62

hak-hak dan kewajiban hukum, tetapi juga memastikan implementasi yang tepat melalui kekuatan eksekutorial. Dengan kekuatan ini, putusan hakim dapat ditegakkan secara paksa oleh lembaga negara untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim perlu mempertimbangkan argumen dari pihak yang mengajukan permohonan dan kemudian menganalisisnya sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan permohonan yang diajukan, baik dengan mengabulkannya maupun menolaknya. Pertimbangan yang baik harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mengutamakan prinsip keadilan, terutama dalam menetapkan hak asuh anak kepada individu yang benar-benar memenuhi syarat sebagai pengasuh.

Dalam mempertimbangkan hak asuh anak, hakim sering kali mengacu pada prinsip kemanfaatan, yaitu prinsip yang mengedepankan dampak positif terbesar bagi anak dan pihak-pihak terkait. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip kemanfaatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi kehidupan anak. Salah satu aspek penting yang diperhatikan hakim adalah kesejahteraan psikologis anak. Anak-anak yang berada dalam situasi konflik perwalian sering kali mengalami tekanan emosional, sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil dapat meminimalkan dampak negatif tersebut.

Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak asuh. Dalam penerapannya, prinsip ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Hakim sering kali bekerja sama dengan profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, untuk mendapatkan penilaian yang mendalam mengenai kondisi anak. Pendapat dari profesional ini memberikan wawasan berharga tentang dampak psikologis dari berbagai opsi hak asuh dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, jika anak sudah cukup dewasa untuk menyuarakan pendapatnya, hakim juga dapat mempertimbangkan keinginan anak tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak yang telah mencapai usia remaja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka dan dapat memberikan pandangan yang relevan terkait pengasuhan mereka.

Stabilitas dan kontinuitas kehidupan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim. Perubahan besar dalam kehidupan anak, seperti pindah tempat tinggal atau sekolah, dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian yang signifikan. Oleh karena itu, hakim akan berusaha memastikan bahwa keputusan hak asuh dapat memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan anak yang sehat. Lingkungan sosial anak juga menjadi faktor yang diperhatikan.⁹ Hakim akan menilai apakah anak memiliki akses ke dukungan sosial yang memadai, seperti keluarga besar,

⁹ Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

teman-teman, dan komunitas yang mendukung. Dukungan sosial ini dapat membantu anak merasa lebih aman dan didukung selama masa transisi.

Dalam beberapa kasus, hakim mungkin merekomendasikan atau mewajibkan orang tua untuk mengikuti pelatihan atau konseling guna meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan emosional dan psikologis anak. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu orang tua menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Dengan pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, hakim dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari perubahan hak asuh.

Namun, meskipun keputusan hakim sering kali dibuat dengan niat terbaik, dampak psikologis pada anak-anak akibat perubahan hak asuh sering kali tidak dapat dihindari. Anak-anak mungkin merasa cemas dan tidak pasti tentang masa depan mereka, terutama jika mereka harus berpindah tempat tinggal atau kehilangan kontak dengan salah satu orang tua. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres dan perasaan tidak aman. Selain itu, anak-anak juga dapat mengalami perasaan kehilangan atau kesepian akibat perpisahan dari lingkungan yang mereka kenal. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan fisik mereka, seperti gangguan tidur, masalah makan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Anak-anak yang berada dalam situasi ini juga mungkin menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi lebih agresif atau menarik diri dari lingkungan sosial mereka.

Dampak lain yang sering dialami anak-anak akibat perubahan hak asuh adalah kesulitan akademis. Anak-anak mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, yang dapat memengaruhi prestasi akademis mereka. Penurunan motivasi untuk belajar dan partisipasi dalam kegiatan sekolah juga sering terjadi akibat perasaan stres dan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting bagi hakim, orang tua, dan profesional kesehatan mental untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Prinsip kesejahteraan anak menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan hak asuh. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan anak, seperti kemampuan orang tua untuk menyediakan lingkungan yang aman dan stabil, serta keinginan anak jika mereka sudah cukup dewasa untuk menyuarakan pendapat mereka.¹⁰ Stabilitas emosional anak sangat penting karena perubahan besar seperti pindah tempat tinggal atau sekolah dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang signifikan. Dengan melibatkan profesional kesehatan mental, hakim dapat merancang strategi untuk mendukung anak selama masa transisi.

Dukungan yang tepat sangat penting bagi anak-anak untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dukungan ini dapat berupa konseling, dukungan emosional dari keluarga dan teman, serta lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang merasa didukung dan dipahami akan lebih mampu mengatasi stres dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Mereka juga lebih mungkin untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan seimbang. Oleh karena itu, analisis putusan hakim

¹⁰ Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>

terhadap hak asuh anak harus selalu mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin terjadi pada anak.

Kesimpulannya, keputusan terkait hak asuh anak memerlukan pertimbangan yang mendalam dan holistik. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mendukung kesehatan emosional dan mental mereka. Dengan pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan anak dan mempertahankan stabilitas emosional mereka, kita dapat membantu anak-anak mengatasi perubahan ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa mereka terus berkembang dengan sehat dan bahagia. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara hakim, orang tua, dan profesional kesehatan mental untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, putusan hakim dapat memberikan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. Dampak Putusan Hakim Terkait Hak Asuh Anak Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologi Anak

Keputusan hakim mengenai hak asuh anak adalah salah satu keputusan yang paling krusial dalam sistem peradilan. Putusan pengadilan terkait hak asuh anak tidak hanya menentukan siapa yang akan merawat anak secara fisik, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak, serta hubungan antara anak dan kedua orang tuanya.¹¹ Secara keseluruhan, putusan pengadilan dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa hak serta kewajiban orang tua tetap berjalan meskipun telah terjadi perceraian. Pentingnya keputusan ini terletak pada dampaknya terhadap kehidupan anak-anak yang menjadi pusat dari konflik perpisahan.

Dalam setiap kasus perceraian yang melibatkan hak asuh anak, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Putusan yang tepat dapat memberikan stabilitas emosional dan lingkungan yang mendukung bagi anak. Namun, jika keputusan tersebut kurang memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan anak, maka risiko trauma atau dampak negatif jangka panjang dapat meningkat. Salah satu dampak terbesar yang sering dirasakan oleh anak adalah ketidakpastian tentang masa depan mereka. Anak-anak yang terpaksa beradaptasi dengan perubahan besar, seperti pindah rumah atau sekolah, sering kali menghadapi stres yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, kehilangan kendali atas hidup mereka, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda stres seperti gangguan tidur, kecemasan, atau perubahan perilaku.

Ketika salah satu orang tua mendapatkan hak asuh, interaksi antara anak dan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh sering kali berkurang. Hal ini dapat melemahkan hubungan emosional antara anak dan orang tua yang tidak tinggal bersama mereka. Sebaliknya, hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua yang mendapatkan hak asuh bisa menjadi lebih erat, namun terkadang juga berpotensi

¹¹ Harahap, F. G. (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif). *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1983>

menimbulkan konflik jika ada perselisihan terkait pengasuhan. Selain itu, putusan pengadilan yang kurang tepat bisa memicu perselisihan lebih lanjut antara kedua orang tua, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan anak.

Aspek ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam penetapan hak asuh. Stabilitas finansial orang tua yang mendapatkan hak asuh sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, makanan, dan kesehatan. Jika pengadilan memutuskan bahwa salah satu orang tua harus memberikan tunjangan anak, penting untuk memastikan bahwa kewajiban ini dijalankan dengan baik. Ketidapatuhan dalam memberikan tunjangan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari perspektif psikologi, keputusan hak asuh anak sering kali melibatkan evaluasi dari ahli kesehatan mental. Psikolog atau pekerja sosial dapat membantu memberikan wawasan mengenai kondisi emosional dan psikologis anak. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak.¹² Dalam beberapa kasus, anak yang sudah cukup dewasa mungkin diminta untuk menyampaikan pandangannya terkait hak asuh. Pendapat mereka dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pendapat anak tidak dipengaruhi oleh salah satu pihak, agar proses pengambilan keputusan tetap objektif.

Hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penting dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh. Prinsip kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak secara menyeluruh. Selain itu, stabilitas dan kontinuitas kehidupan anak harus dijaga. Anak-anak yang terpaksa menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka, seperti pindah tempat tinggal atau lingkungan sosial, sering kali mengalami dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan hak asuh dapat memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan anak yang sehat.

Dukungan sosial juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Anak-anak yang memiliki akses ke dukungan sosial yang memadai, seperti keluarga besar, teman-teman, dan komunitas yang mendukung, cenderung lebih mampu mengatasi perubahan yang terjadi akibat perceraian orang tua mereka. Dukungan sosial ini dapat membantu anak merasa lebih aman dan didukung selama masa transisi. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin merekomendasikan atau mewajibkan orang tua untuk mengikuti pelatihan atau konseling guna meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan emosional dan psikologis anak. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang bagi anak-anak.

Dampak psikologis dari keputusan hak asuh anak tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang mengalami perubahan hak asuh sering kali menghadapi kecemasan dan depresi akibat ketidakpastian dan stres. Mereka mungkin merasa kehilangan salah satu

¹² Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>

orang tua atau terpisah dari lingkungan yang sudah mereka kenal. Perasaan ini dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan dan bahkan memengaruhi kesehatan fisik mereka. Anak-anak yang mengalami stres berkepanjangan sering kali menunjukkan perubahan perilaku, seperti menjadi lebih agresif, menarik diri, atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Perubahan ini sering kali mencerminkan perjuangan mereka dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Pendidikan anak juga bisa terdampak oleh keputusan hak asuh. Anak-anak yang menghadapi perubahan lingkungan, seperti pindah sekolah, sering kali mengalami kesulitan akademis. Mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-teman baru dan lingkungan baru. Semua ini dapat memengaruhi prestasi akademis mereka secara negatif.¹³ Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan yang memadai kepada anak-anak selama masa transisi ini. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dapat mengatasi kesulitan akademis mereka dan terus berkembang dengan baik.

Keputusan hakim juga memiliki implikasi yang luas terhadap perilaku anak. Anak-anak yang mengalami ketidakstabilan emosional akibat perubahan hak asuh sering kali menunjukkan masalah perilaku. Mereka mungkin menjadi lebih agresif, menarik diri dari interaksi sosial, atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Masalah perilaku ini sering kali merupakan cara anak-anak mengekspresikan rasa sakit dan kebingungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pihak-pihak terkait untuk mengenali tanda-tanda ini dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak-anak mengatasi masalah mereka.

Hubungan sosial anak juga dapat terdampak oleh perubahan hak asuh. Anak-anak yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sering kali mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman baru. Mereka mungkin merasa terisolasi dan kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang baru. Perasaan ini dapat memengaruhi kepercayaan diri mereka dan membuat mereka merasa lebih cemas dalam situasi sosial. Dukungan dari keluarga, guru, dan teman-teman sangat penting untuk membantu anak-anak mengatasi kesulitan ini dan membangun hubungan sosial yang sehat.

Masalah kesehatan fisik juga sering kali muncul akibat stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Anak-anak yang menghadapi perubahan besar dalam hidup mereka sering kali mengalami gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Semua ini dapat memengaruhi kesehatan fisik mereka secara keseluruhan dan memerlukan perhatian yang serius. Orang tua dan pihak-pihak terkait harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan fisik mereka selama masa transisi ini. Dalam beberapa kasus, pendekatan psikologi hukum dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan terkait hak asuh. Pendekatan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses hukum, seperti evaluasi kondisi mental anak dan rekomendasi ahli psikologi terkait pengasuhan. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

¹³ Siregar, L. Y. S. (2017). PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM. *Bunayya Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>

mengenai kebutuhan anak dan membantu hakim membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

Secara keseluruhan, keputusan hakim mengenai hak asuh anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, keputusan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan anak-anak. Stabilitas emosional, dukungan sosial, dan kesehatan fisik serta mental anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi akibat perubahan hak asuh dan terus berkembang menjadi individu yang sehat dan bahagia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak putusan hakim terkait hak asuh anak sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak. Keputusan ini menentukan tanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan anak pasca perceraian, sehingga harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak pendidikan, emosional, psikologis, perilaku, dan fisik. Hakim memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan anak melalui prinsip dan praktik yang mempertimbangkan aspek psikologis secara menyeluruh. Keputusan yang dibuat harus menjaga kesehatan mental dan emosional anak, hubungan dengan kedua orang tua, serta kebutuhan akan lingkungan yang stabil dan mendukung.

Untuk mengurangi dampak psikologis negatif pada anak, putusan hakim perlu memperhatikan pendapat dan keinginan anak sesuai dengan usia dan kematangan mereka, kemampuan orang tua dalam mengurus anak, serta konsultasi dengan ahli psikologi anak. Hakim juga diharapkan meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek psikologis anak dan menyediakan dukungan psikologis yang memadai setelah keputusan diambil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan putusan terkait hak asuh dapat mendukung perkembangan mental yang sehat, stabilitas emosional yang berkelanjutan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan selama dan setelah proses penentuan hak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakung, D. A.**, Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaaruyana Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*.
- Dahwadin, D.**, Syaripudin, E. I., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Djamilah, D.**, & Kartikawati, R. (2016). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>

- Fitri, A. N.,** Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Hafis, M.,** & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah sebagai problem solver terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i3.2420>
- Harahap, F. G.** (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komperatif). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1983>
- Ivana, R.,** & Cahyaningsih, D. T. (2020). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK. *Jurnal Privat Law*. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>
- Mumtaz, H., Jr,** Uyun, Y. S., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>
- Muhtar, M. H.,** Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Siregar, L. Y. S.** (2017). PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM. *Bunayya Jurnal Pendidikan Anak*. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>
- Syarif, M.,** Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM*.
- Widanengsih, N. A.,** & Maryandi, N. Y. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Wildana, D. T.,** & Hasba, I. B. (2017). PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4549>